

## Penguatan Etika Kewarganegaraan dalam Kehidupan Demokratis Melalui Kompetensi Pedagogis

Dinie Anggraeni Dewi <sup>a,1\*</sup>, Asep Anggi Buldani <sup>a,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Insan Cendikia Mandiri, Indonesia

<sup>1</sup> [dinieanggraenidewi@upi.edu](mailto:dinieanggraenidewi@upi.edu)\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel

: ABSTRAK

*Received: 23 Juni 2024;*

*Revised: 17 Oktober 2024;*

*Accepted: 30 November 2024.*

**Kata-kata kunci:**

Etika

Kewarganegaraan;

Demokrasi;

Partisipasi;

Pendidikan

Pengembangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mahasiswa calon guru Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Sekolah Dasar terkait dengan pengembangan etika kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 10 calon guru pendidikan sekolah dasar di Kota Cibiru, Bandung, Jawa Barat, dan 10 calon guru pendidikan kewarganegaraan di Yogyakarta. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi dan dokumen. Analisis data menggunakan pendekatan analisis interaktif, dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa etika kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis melibatkan rangkaian langkah dan strategi untuk meningkatkan keterlibatan aktif individu dalam proses demokrasi. Hal ini mencakup edukasi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pelatihan dalam keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, promosi nilai-nilai demokrasi seperti pluralisme dan toleransi, serta pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Dengan pendekatan ini, individu dapat lebih memahami, menghargai, dan mengambil bagian aktif dalam memperkuat demokrasi. Pengembangan potensi partisipasi dalam kehidupan demokratis menjadi penting.

**ABSTRACT**

**Keywords:**

Ethics

Citizenship;

Democracy;

Participation;

Education

Development.

**Strengthening Civic Ethics in Democratic Life Through Pedagogical Competence.** This study aims to explore how pre-service Civic Education and Elementary Education teachers engage with the development of civic ethics in democratic life. The research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with 10 pre-service elementary education teachers in Cibiru City, Bandung, West Java, and 10 pre-service civic education teachers in Yogyakarta. In addition to interviews, the researcher conducted observations and document analysis. Data analysis utilized an interactive analysis approach, with data validity ensured through triangulation. The findings reveal that civic ethics in democratic life involve a series of steps and strategies to enhance individuals' active engagement in democratic processes. These include education on the rights and responsibilities of citizens, training in skills for participation in political and social life, promotion of democratic values such as pluralism and tolerance, and community empowerment to engage in public decision-making. Through this approach, individuals can better understand, appreciate, and actively participate in strengthening democracy. Developing the potential for participation in democratic life emerges as a critical focus.

Copyright © 2024 (Dinie Anggraeni Dewi & Asep Anggi Buldani). All Right Reserved

How to Cite : Dewi, D. A., & Buldani, A. A. (2024). Penguatan Etika Kewarganegaraan dalam Kehidupan Demokratis Melalui Kompetensi Pedagogis. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(2), 457-466. <https://doi.org/10.21067/jmk.v9i2.10353>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Banyak permasalahan utama yang memerlukan keterlibatan mengenai isu-isu dalam pengambilan keputusan demokratis mengenai masa depan (Zarestky & Vilen, 2023). Inovasi demokrasi telah digunakan untuk mengatasi peningkatan permintaan partisipatif dari warga negara (Butzlaff, 2022). Pemahaman yang ada mengenai partisipasi sering kali menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara non-partisipasi dan partisipasi aktif (Pitti et al., 2021). Keterlibatan dalam kehidupan demokrasi mengembangkan sikap partisipatif, di mana individu terlibat secara aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik (Dewi et al., 2024).

Sistem pendidikan yang memungkinkan demokrasi yaitu pendidikan inklusif, relevansi, dan demokrasi (Sakız et al., 2022). Menyiapkan anak muda untuk aktif dalam sistem demokrasi melibatkan lebih dari sekadar mengingat fakta dan statistik secara mekanis (Hillygus & Holbein, 2023). Demokrasi partisipatif mendapat perhatian khusus dalam beberapa tahun terakhir karena demokrasi partisipatif mengarah pada pemerintahan yang transparan melalui desentralisasi dan partisipasi warga negara (Malik & Nayak, 2021). Partisipasi demokratis harus menumbuhkan sikap kasih sayang pada anak usia dini (Shih, 2021). Untuk menciptakan perubahan sosial tanpa masukan, partisipasi demokratis bukan semata-mata masalah semantik namun dapat terjadi secara pragmatis (Faber, 2003).

Penelitian terdahulu tentang etika kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis telah menyelidiki berbagai aspek terkait, dengan fokus pada konsep budaya etika kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Ilišin & Baketa (2023) serta dimensi etika kewarganegaraan dalam partisipasi politik yang dianalisis oleh Pham & Kaleja (2019). Aspek etika kewarganegaraan di era digital telah diperiksa oleh Hidayah, Y (2020) sementara Halvorsen dan Annunziata (2024) menggali dinamika etika kewarganegaraan dalam konteks demokrasi perkotaan. *State of the art* dalam penelitian ini mencakup empat studi terdahulu yang masing-masing menyoroti aspek berbeda dari etika kewarganegaraan. Ilišin dan Baketa berfokus pada hubungan antara budaya etika kewarganegaraan dan keterlibatan politik individu, sedangkan Pham dan Kaleja menganalisis dampak teknologi dan urbanisasi terhadap pembentukan etika kewarganegaraan. Halvorsen dan Annunziata mengeksplorasi berbagai dimensi etika kewarganegaraan masyarakat dan teori-teorinya. Penelitian Hidayah, di sisi lain, memberikan kontribusi penting dengan mengeksplorasi bagaimana kompetensi pedagogis calon guru dapat memperkuat etika kewarganegaraan dan mendukung kehidupan demokratis.

Berbeda dari studi sebelumnya yang menekankan budaya politik atau faktor eksternal, Hidayah mengisi kekosongan dalam literatur dengan menyoroti peran pendidikan dalam membentuk etika kewarganegaraan, menawarkan perspektif baru yang menghubungkan pendidikan kewarganegaraan dengan keterlibatan demokratis secara etis. Hakikat sistem politik demokratis adalah sebuah sistem di mana kekuasaan dan keputusan politik dijalankan dan dipengaruhi oleh partisipasi aktif warga negara, umumnya melalui proses pemilihan umum yang bebas dan adil seperti yang dikatakan Barcinas & Fleener (2023) bahwa pendidikan berperan dalam demokrasi modern dalam mendukung partisipasi masyarakat dan keterlibatan demokratis. Melihat fenomena jika dalam sistem politik demokratis, keputusan-keputusan politik dibuat dengan mempertimbangkan pendapat publik dan melalui proses pembuatan keputusan yang transparan dan akuntabel oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengembangan potensi partisipasi dalam kehidupan demokratis dari

calon guru mereka memiliki peran kunci dalam membentuk sikap dan pemahaman siswa terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Penelitian ini fokus utama adalah bagaimana calon guru yang memiliki peran strategis dalam membentuk perspektif dan pemahaman siswa terhadap prinsip-prinsip demokrasi, dapat memperluas dan memperdalam potensi partisipasi siswa dalam kehidupan demokratis. Keterbaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang holistik untuk mengembangkan tidak hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap partisipatif siswa dalam memahami, menghargai, dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian ini berkontribusi dalam keilmuan pendidikan keguruan yaitu memberikan pemahaman kepada calon guru untuk mengembangkan metode-metode pembelajaran yang mendorong partisipasi siswa dalam kehidupan politik dan sosial seperti yang dikatakan Daniele et al.,(2022) bahwa pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui intervensi pencegahan khusus dan melalui praktik pendidikan sehari-hari.

Penguatan etika kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis melalui kompetensi pedagogis calon guru merupakan tujuan ideal dalam pendidikan kewarganegaraan. Secara teoritis, idealnya calon guru harus dilengkapi dengan keterampilan pedagogis yang memadai untuk membentuk sikap dan perilaku demokratis di kalangan siswa, memfasilitasi pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mempromosikan partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Namun, secara de facto, terdapat berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan ini. Banyak calon guru masih menghadapi kekurangan dalam pemahaman dan penerapan metode pedagogis yang efektif untuk mengajarkan etika kewarganegaraan.

*Subject-matter* dalam etika kewarganegaraan atau penerapan metode pedagogis dalam pendidikan untuk membangun kesadaran siswa akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Penerapan etika ini melibatkan pembelajaran yang berfokus pada nilai-nilai keadilan, toleransi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Guru memiliki peran strategis dalam memfasilitasi diskusi tentang dilema etika, seperti bagaimana menyikapi ketidakadilan di kelas atau memperdebatkan isu-isu terkait hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Dengan metode ini, siswa tidak hanya belajar tentang teori kewarganegaraan tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan moral untuk membuat keputusan etis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks lokal maupun global.

Kurikulum pendidikan kewarganegaraan sering kali tidak mencakup strategi praktis yang memadai untuk membentuk etika demokratis, dan pelatihan guru sering kali kurang menekankan pada pengembangan keterampilan yang spesifik untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dalam pengajaran. Akibatnya, meskipun ada teori yang kuat tentang pentingnya kompetensi pedagogis dalam penguatan etika kewarganegaraan, implementasinya seringkali tidak sesuai dengan harapan, dan calon guru mungkin tidak sepenuhnya siap untuk memenuhi peran mereka dalam mendukung kehidupan demokratis secara efektif.

Penelitian ini sangat penting karena mengisi kekosongan signifikan dalam literatur pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks penguatan etika kewarganegaraan melalui kompetensi pedagogis calon guru. Meskipun terdapat konsensus teoritis tentang pentingnya etika kewarganegaraan dan peran guru dalam pendidikan demokratis,

implementasi nyata sering kali tidak memenuhi standar ideal yang diharapkan. Saat ini, banyak calon guru menghadapi tantangan dalam menerapkan metode pedagogis yang efektif untuk membentuk sikap demokratis di kalangan siswa. Penelitian ini mendalami bagaimana calon guru dapat dioptimalkan untuk mendukung etika kewarganegaraan dan partisipasi demokratis, memberikan wawasan praktis dan teoritis yang dapat memperbaiki kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan guru. Dengan memperjelas dan menilai hubungan antara kompetensi pedagogis dan penguatan etika kewarganegaraan, penelitian ini menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan dan memastikan bahwa guru siap untuk membentuk generasi mendatang yang aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

## Metode

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, berfokus pada penguatan etika kewarganegaraan melalui kompetensi pedagogis calon guru. Data dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan 20 calon guru yang terdiri dari 10 di Kota Cibiru Bandung dan 10 di Yogyakarta. Upaya tersebut untuk mengeksplorasi bagaimana mereka memahami, menginternalisasi, dan merencanakan pendidikan etika kewarganegaraan dalam konteks kehidupan demokratis. Tahapan penelitian mencakup identifikasi masalah, perancangan kerangka penelitian, pengumpulan data kualitatif, analisis data, dan interpretasi temuan. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan fokus pada bagaimana kompetensi pedagogis guru berkontribusi terhadap penguatan etika kewarganegaraan. Penelitian ini mencakup dua aspek utama: etika kewarganegaraan (hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik dan sosial, nilai-nilai demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat) serta partisipasi dalam kehidupan demokratis (pemilihan umum, organisasi sipil, diskusi, kampanye, dan keputusan lokal).

## Hasil dan pembahasan

Berdasarkan tujuan penelitian, disajikan indikator penelitian yang meliputi edukasi tentang hak sebagai warga negara, Edukasi tentang kewajiban sebagai warga negara, pelatihan dalam keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, promosi nilai-nilai demokrasi seperti pluralisme dan toleransi, pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik.

Selain itu, data menunjukkan bahwa calon guru menggunakan skenario simulasi yang mencerminkan situasi kehidupan nyata, seperti pengambilan keputusan dalam konteks pemilihan umum atau penyelesaian konflik sosial. Keputusan moral dalam konteks ini dihasilkan melalui analisis mendalam terhadap situasi yang melibatkan pertimbangan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial, yang kemudian diterjemahkan ke dalam strategi pedagogis yang mendukung pembentukan sikap dan perilaku demokratis di kalangan siswa. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa calon guru, baik dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maupun Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), terpapar pada simulasi yang menantang mereka untuk mengambil keputusan dalam skenario kehidupan nyata, seperti pengambilan keputusan terkait pemilihan umum atau penyelesaian konflik sosial. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UPI yang menyatakan tentang integrasi situasi kehidupan nyata

“Simulasi seperti itu sangat berguna untuk kami, terutama dalam mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga berdasarkan situasi nyata. Misalnya, ketika kami diminta untuk menyelesaikan konflik sosial dalam simulasi, kami diajarkan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keadilan, empati, dan dampak keputusan terhadap masyarakat. Ini mengajarkan kami untuk tidak hanya mengutamakan teori, tetapi juga untuk melihat konteks sosial yang lebih luas”

Pemahaman calon guru pendidikan sekolah dasar dan calon guru Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan gambaran yang komprehensif tentang pengembangan potensi partisipasi dalam kehidupan demokratis. Pemahaman mereka adalah berbeda dalam setiap indikatornya. Etika kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis, mencerminkan pendekatan dan fokus yang berbeda terhadap penerapan konsep-konsep demokrasi dalam konteks pendidikan.

Sehubungan dengan hal itu, Menurut Österman & Robinson (2022) ilmu politik mengakui pentingnya pendidikan dalam mengembangkan dukungan terhadap demokrasi dan dalam proses demokratisasi. Selain itu, Riesch et al (2021) menyoroti penggunaan bahasa dalam aktivitas demokrasi menyatakan bahwa bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan keprihatinan oleh gerakan sosial merupakan sebagai upaya membangun identitas kolektif dalam mengembangkan kesadaran politik masyarakat, memfasilitasi ekspresi publik terhadap isu-isu sosial dan politik, serta memperkuat solidaritas dan partisipasi aktif dalam proses demokratis.

Kuş (2024) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan generasi mendatang dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan demokrasi. Dalam hal ini, edukasi tentang hak sebagai warga negara merupakan kesadaran kewarganegaraan yang meliputi hak-hak seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak atas keadilan dalam sistem hukum, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak. Selanjutnya indikator tentang edukasi tentang kewajiban sebagai warga negara adalah aspek penting dalam membangun komitmen dan tanggung jawab individu terhadap kehidupan bersama dalam masyarakat. Darling-Hammond & McGuire (2023) berpendapat bahwa dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara memerlukan perubahan signifikan. Kemudian Hsu et al (2021) menyatakan bahwa tanggung jawab sipil dalam keterlibatan masyarakat sipil mediasi pembelajaran kewarganegaraan dan ekspresi kewarganegaraan. Jika dikaitkan dengan edukasi tentang kewajiban sebagai warga negara, hal ini menjadi pemahaman tentang tanggung jawab moral, hukum, dan sosial yang harus dipenuhi setiap warga negara terhadap negara dan sesamanya. Kewajiban-kewajiban ini mencakup partisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti toleransi, keadilan, dan gotong royong.

Indikator pelatihan dalam keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial merupakan langkah penting dalam mempersiapkan individu untuk terlibat secara aktif dan efektif dalam proses demokratis. Wilf et al (2022) menyatakan bahwa dalam warga negara ialah mengidentifikasi dengan menggunakan refleksi kritis untuk mengubah budaya dan pikiran, menavigasi dan memanfaatkan berbagai identitas, dan membangun kemandirian politik kolektif. kemudian O'Reilly (2022) menyampaikan jika dalam masalah politik kondisi kehidupan merupakan aksi sosial yang tidak hanya menekankan pada pemahaman tentang

---

struktur dan mekanisme politik, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi. Berkaitan dengan pelatihan dalam keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan politik tentu saja ini menjadi cara berkolaborasi dengan berbagai pihak, membangun jaringan yang kuat, dan menggunakan alat-alat partisipasi seperti diskusi, debat, atau kampanye dengan efektif.

Promosi nilai-nilai demokrasi seperti pluralisme dan toleransi memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Cheng et al (2023) menyatakan jika masyarakat yang inklusif adalah bagian penting dari pembangunan manusia yang semakin berkelanjutan dan keharmonisan masyarakat. Dalam hal pluralisme maka ini mengacu pada pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan politik di dalam sebuah masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Porter (2021) bahwa masyarakat menawarkan semacam ensiklik sosial yang buka hanya tentang etika sosial, melainkan sebuah risalah tentang teologi moral yang dipertimbangkan secara komprehensif. Di sisi lain, toleransi melibatkan sikap terbuka dan penerimaan terhadap pandangan, keyakinan, dan praktik yang berbeda dari yang kita miliki sendiri. Edukasi dan promosi aktif terhadap nilai-nilai ini tidak hanya membantu membangun kehidupan sosial yang damai dan berdampingan, tetapi juga mengurangi konflik antarkelompok serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik merupakan strategi penting dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Gupta (2022) menjelaskan bahwa Covid-19 memberikan pelajaran bahwa di masa depan kita tidak bisa mengandalkan negara kesejahteraan untuk menangani wabah atau bencana alam terdapat kebutuhan mendesak untuk melibatkan masyarakat partisipatif dan berbagai pemangku kepentingan dalam usaha kesejahteraan di masa depan. Secara konkrit Bohmer et al., (2020) memberikan cara untuk mengorganisir dan memberi penghargaan pada masyarakat dalam mendistribusikan partisipasinya ialah dengan merangsang diskusi mengenai solusi, dan tidak bias gender dalam masyarakat masa depan dengan perekonomian sosialis yang partisipatif. Konsep ini mengacu pada upaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan akses yang diperlukan kepada masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan ini mencakup pendidikan tentang hak dan kewajiban warga negara, serta cara-cara untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam forum-forum diskusi atau konsultasi publik.

Temuan selanjutnya ialah dari indikator partisipasi dalam kehidupan demokratis meliputi pemilihan umum, partisipasi dalam organisasi sipil, partisipasi dalam diskusi dan debat, kegiatan kampanye dan advokasi, partisipasi dalam proses keputusan lokal. Dalam hal ini, Peneliti fokus pada variabel dari etika kewarganegaraan yang dikembangkan dalam komponen Partisipasi dalam kehidupan demokratis yaitu pemilihan umum, partisipasi dalam organisasi sipil, partisipasi dalam diskusi dan debat, kegiatan kampanye dan advokasi partisipasi dalam proses keputusan. Pentingnya proses demokratisasi dalam suatu negara tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum yang adil, transparan, dan partisipatif. Dalam keterlibatan politik terdapat beberapa bentuk partisipasi instrumental yang merupakan salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi yang memberikan hak suara kepada warga negara. Pemilihan umum yang adil, transparan, dan partisipatif memiliki berbagai indikator ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan logistik dan administratif yang baik, pendidikan pemilih, hingga keadilan dalam peraturan dan prosedur pemilu (Dipoppa & Grossman, 2020) Secara lebih lanjut, Ridge-Newman (2020) menyampaikan jika mode keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik mengikuti bagaimana perkembangan teknokultural yang lebih luas

---

berdampak pada keterlibatan politik antara pemilu. Selain itu, pemilihan umum yang berhasil juga mencerminkan tingkat partisipasi yang tinggi dari berbagai segmen masyarakat, menunjukkan keterlibatan aktif warga dalam proses politik negara mereka.

Partisipasi dalam organisasi sipil memainkan peran kunci dalam memperkuat masyarakat sipil dan membangun demokrasi yang inklusif. Organisasi sipil atau non-pemerintah (NGO) sering kali menjadi platform bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi mereka. Meskipun jumlah pemilih meningkat secara dramatis namun golput yang terjadi didorong oleh rendahnya tingkat kepentingan politik umum dan kecanggihan politik khusus (Schäfer, 2021). Dalam partisipasi sipil dan politik muncul kesenjangan yaitu ketika mendokumentasikan motivasi dan bentuk spesifik partisipasi, serta implikasinya terhadap keterlibatan selanjutnya (Kwan, 2021). Dalam hal ini, melalui organisasi sipil individu dapat mengartikulasikan kepentingan bersama, mengadvokasi perubahan sosial atau kebijakan publik, serta mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga publik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Partisipasi dalam diskusi dan debat merupakan sarana penting dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta komunikasi publik. Melalui diskusi dan debat, individu dapat secara aktif mengemukakan pandangan, mempertimbangkan argumen dari berbagai sudut pandang, dan mencari solusi atas isu-isu kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Relevansi lanjutan dari teori pemilu merupakan prediktor paling ampuh dalam menentukan perolehan dan kekalahan pemilu dalam pemilu (Ehin & Talving, 2021). Perilaku memilih berasal dari keyakinan bahwa keterikatan sosial dan akar ke dalam lingkungan sosial dan komunitas lokal penting bagi biaya keikutsertaan dalam pemilu lokal dan biaya untuk memutuskan apakah akan berpartisipasi (Markowski et al., 2023). Partisipasi dalam diskusi dan debat juga mengajarkan keterampilan membangun argumen yang kuat, mendengarkan dengan empati, serta berkolaborasi untuk mencapai konsensus atau pemecahan masalah bersama.

Kegiatan kampanye dan advokasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi opini publik, memobilisasi dukungan, dan mendorong perubahan sosial atau kebijakan di berbagai tingkatan masyarakat. Kampanye umumnya digunakan untuk mengedukasi dan menggalang dukungan dari publik terkait isu-isu penting, baik itu kesehatan, lingkungan, pendidikan, atau hak asasi manusia. Evaluasi integritas pemilu sangat bervariasi dan menyoroti bahwa pertanyaan mengenai integritas pemilu lebih bersifat lokal dibandingkan tersebar luas, dan meskipun terdapat dampak yang signifikan dari efek pemenang/kalah (Fisher & Sällberg, 2020). Kampanye sering kali melibatkan berbagai strategi komunikasi, mulai dari media sosial, kampanye daring, sampai demonstrasi publik. Sementara itu, advokasi fokus pada upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik atau praktik-praktik korporasi dengan mengumpulkan bukti, mengoordinasikan koalisi, dan menyampaikan argumen yang kuat kepada pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan lainnya.

Partisipasi dalam proses keputusan lokal adalah aspek penting dalam memperkuat demokrasi yang berbasis pada partisipasi publik. Melalui partisipasi ini, warga dapat berperan aktif dalam menentukan kebijakan dan program yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka di tingkat lokal Safa'at (2021) menjelaskan jika dalam pemilu kandidat tunggal meningkat karena menjadi cara yang lebih mudah dan murah untuk memastikan kemenangan. Partisipasi dalam proses keputusan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menghadiri pertemuan komunitas, memberikan masukan dalam konsultasi publik, atau bergabung dalam forum-forum partisipatif yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dengan terlibat dalam proses

ini, warga tidak hanya dapat menyuarakan kepentingan mereka, tetapi juga berkontribusi dalam menyusun solusi yang lebih baik atas berbagai masalah lokal yang dihadapi, seperti infrastruktur, lingkungan, kesehatan, atau pendidikan.

## Simpulan

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan etika kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis memerlukan strategi yang terintegrasi untuk meningkatkan keterlibatan aktif individu, khususnya di kalangan calon guru. Temuan dalam penelitian ini pendekatan holistik dalam pendidikan kewarganegaraan, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap partisipatif, sangat penting untuk membentuk perspektif dan pemahaman siswa terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Calon guru, sebagai agen perubahan, memiliki peran strategis dalam menerapkan metode pembelajaran yang tidak hanya menanamkan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam bidang pendidikan keguruan dengan menawarkan wawasan tentang kompetensi pedagogis yang dapat diterjemahkan menjadi praktik pendidikan yang efektif untuk memperkuat etika kewarganegaraan dan keterlibatan demokratis di kalangan siswa.

## Referensi

- Barcinas, S. J., & Fleener, M. J. (2023). Adult Education, Futures Literacy, and Deep Democracy: Engaging Democratic Visioning and Anticipatory Futures For More Sustainable Futures. *Adult Learning*, 34(3), 131–141. <https://doi.org/10.1177/10451595231166726>
- Bohmer, P., Chowdhury, S., & Hahnel, R. (2020). Reproductive Labor in a Participatory Socialist Society. *Review of Radical Political Economics*, 52(4), 755–771. <https://doi.org/10.1177/0486613419869369>
- Butzlaff, F. (2022). Consenting Participation? How Demands for Citizen Participation and Expert-Led Decision-Making Are Reconciled in Local Democracy. *Political Studies Review*, 21(2), 340–356. <https://doi.org/10.1177/14789299221091884>
- Cheng, Z., Wang, R., Li, Y., & Dai, J. (2023). Paving the Way for a Sustainable Society: Assessing the Inclusive Tourism Development in Transition China. *The Journal of Environment & Development*, 32(4), 323–342. <https://doi.org/10.1177/10704965231197672>
- Daniele, K., Gambacorti Passerini, M. B., Palmieri, C., & Zannini, L. (2022). Educational interventions to promote adolescents' mental health: A scoping review. *Health Education Journal*, 81(5), 597–613. <https://doi.org/10.1177/00178969221105359>
- Darling-Hammond, L., & McGuire, K. (2023). Policy for Civic Reasoning. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 705(1), 232–248. <https://doi.org/10.1177/00027162231193276>
- Dewi, D. A., Hidayah, Y., Trihastuti, M., Matang, , Buldani, A. A., & Feriandi, Y. A. (2024). Empowering Student's Learning Involvement Through STEM Approach in Citizenship Education Learning in the New Normal Era. *KnE Social Sciences*, 9(13 SE-Articles). <https://doi.org/10.18502/kss.v9i13.16053>
- Dipoppa, G., & Grossman, G. (2020). The Effect of Election Proximity on Government Responsiveness and Citizens' Participation: Evidence From English Local Elections. *Comparative Political Studies*, 53(14), 2183–2212. <https://doi.org/10.1177/0010414020912290>
- Ehin, P., & Talving, L. (2021). Still second-order? European elections in the era of populism, extremism, and Euroscepticism. *Politics*, 41(4), 467–485. <https://doi.org/10.1177/0263395720986026>
- Faber, B. (2003). Creating Rhetorical Stability in Corporate University Discourse: Discourse Technologies and Change. *Written Communication*, 20(4), 391–425. <https://doi.org/10.1177/0741088303259869>



- Fisher, J., & Sällberg, Y. (2020). Electoral integrity – The winner takes it all? Evidence from three British general elections. *The British Journal of Politics and International Relations*, 22(3), 404–420. <https://doi.org/10.1177/1369148120912668>
- Gupta, A. (2022). From the Welfare State to the Welfare Society: A Shift in Paradigm. *Indian Journal of Public Administration*, 68(1), 62–74. <https://doi.org/10.1177/00195561211058770>
- Hidayah, Y. (2020). *Disertasi: Pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan civic engagement warga negara muda di era digital*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hillygus, D. S., & Holbein, J. B. (2023). Refocusing Civic Education: Developing the Skills Young People Need to Engage in Democracy. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 705(1), 73–94. <https://doi.org/10.1177/00027162231177798>
- Hsu, P.-C., Chang, I.-H., & Chen, R.-S. (2021). The Impacts of College Students' Civic Responsibility on Civic Engagement via Online Technology: The Mediations of Civic Learning and Civic Expression. *Sage Open*, 11(3), 21582440211031908. <https://doi.org/10.1177/21582440211031908>
- Ilišin, V., & Baketa, N. (2023). Constitutional values & political trust: Foundations for student democratic participation. *Citizenship, Social and Economics Education*, 23(2), 70–86. <https://doi.org/10.1177/14788047231204617>
- Kuş, Z. (2024). Teachers' and parents' perspectives on citizenship education in Turkey: Consensus and disagreements. *Education, Citizenship and Social Justice*, 17461979241240452. <https://doi.org/10.1177/17461979241240451>
- Kwan, J. Y. (2021). 'Democracy and Active Citizenship Are Not Just About the Elections': Youth Civic and Political Participation During and Beyond Singapore's Nine-day Pandemic Election (GE2020). *YOUNG*, 30(3), 247–264. <https://doi.org/10.1177/11033088211059595>
- Malik, G., & Nayak, S. (2021). Participatory Democracy of Women in Rural India: A Field-based Experience of Palli Sabha from Odisha. *Contemporary Voice of Dalit*, 2455328X211020540. <https://doi.org/10.1177/2455328X211020540>
- Markowski, R., Żerkowska-Balas, M., & Stanley, B. (2023). Participation in Polish Local Elections: Sheer Rational Choice or Social Embeddedness Fate? *East European Politics and Societies*, 38(1), 123–147. <https://doi.org/10.1177/08883254231177416>
- O'Reilly, C. (2022). Naming and Blaming: Civic Shame and Slum Journalism in Late Nineteenth-Century and Early Twentieth-Century Manchester and Birmingham. *Journal of Urban History*, 49(3), 505–519. <https://doi.org/10.1177/00961442221127055>
- Österman, M., & Robinson, D. (2022). Educating Democrats or Autocrats? The Regime-Conditional Effect of Education on Support for Democracy. *Political Studies*, 71(4), 1298–1320. <https://doi.org/10.1177/00323217211067385>
- Pham, L., & Kaleja, A. (2019). Political participation under conditions of (democratic) duress. *Politics*, 40(2), 154–169. <https://doi.org/10.1177/0263395719863646>
- Pitti, I., Mengilli, Y., & Walther, A. (2021). Liminal Participation: Young People's Practices in the Public Sphere Between Exclusion, Claims of Belonging, and Democratic Innovation. *Youth & Society*, 55(1), 143–162. <https://doi.org/10.1177/0044118X211040848>
- Porter, J. (2021). For the Life of the World: Some Reflections. *Theology Today*, 78(4), 357–364. <https://doi.org/10.1177/00405736211048797>
- Ridge-Newman, A. (2020). Digital media as a driver of change in political organisation: 2010 and 2015 UK general elections. *Media, Culture & Society*, 42(7–8), 1343–1359. <https://doi.org/10.1177/0163443720916398>
- Riesch, H., Vrikki, P., Stephens, N., Lewis, J., & Martin, O. (2021). "A Moment of Science, Please": Activism, Community, and Humor at the March for Science. *Bulletin of Science, Technology & Society*, 41(2–3), 46–57. <https://doi.org/10.1177/02704676211042252>
- Safa'at, M. A. (2021). Single candidates: Ensuring a path to victory in local elections. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(4), 1163–1176. <https://doi.org/10.1177/2057891211062485>

- Sakız, H., Çuhadar, P., & Çirkin, Z. (2022). Quality of Education From a Social Justice and Capabilities Perspective: The Case of Turkey. *International Journal of Educational Reform*, 34(1), 141–157. <https://doi.org/10.1177/10567879221121638>
- Schäfer, C. (2021). Indifferent and Eurosceptic: The motivations of EU-only abstainers in the 2019 European Parliament election. *Politics*, 41(4), 522–536. <https://doi.org/10.1177/0263395720981359>
- Shih, Y.-H. (2021). Love-based relationships between teachers and students in early childhood education. *Policy Futures in Education*, 20(7), 748–761. <https://doi.org/10.1177/14782103211063050>
- Wilf, S., Maker Castro, E., Gupta, K. G., & Wray-Lake, L. (2022). Shifting Culture and Minds: Immigrant-Origin Youth Building Critical Consciousness on Social Media. *Youth & Society*, 55(8), 1589–1614. <https://doi.org/10.1177/0044118X221103890>
- Zarestky, J., & Vilen, L. (2023). Adult STEM Education for Democratic Participation. *Adult Learning*, 34(3), 157–167. <https://doi.org/10.1177/10451595231153133>